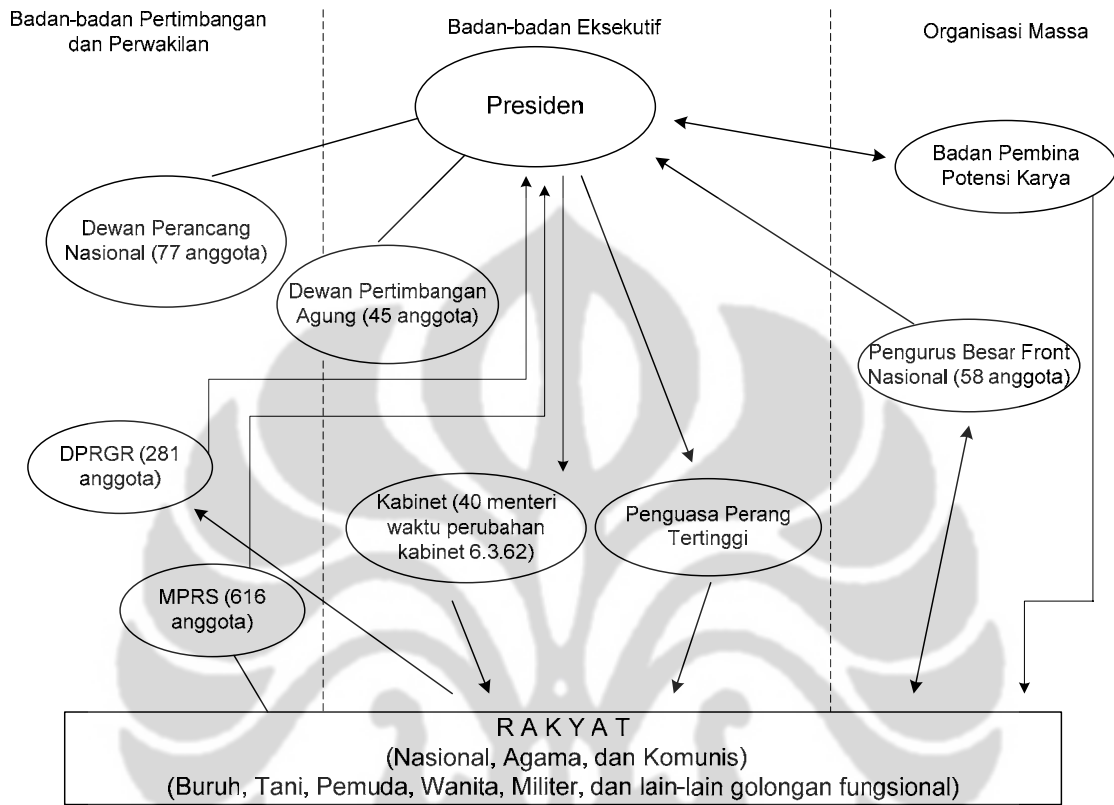




LAMPIRAN

Bagan 8. Lembaga-lembaga Politik Demokrasi Terpimpin



Sumber:
Herbert Feith, *Soekarno dan Militer Dalam Demokrasi Terpimpin* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2001), hlm. 77.

MEDIA INDONESIA

SENIN, 19 MEI 2008/NO.9980/TAHUN XXXIX
 Customer Service: (021) 5621303 • Layanan

Indonesia Memasuki Kebangkrutan Nasional

JAKARTA (MI): Besar, bangsa Indonesia memperingati 100 tahun Kebangkitan Nasional. Namun, sebagaimana sering dikatakan mantan Ketua PP Muhammadiyah Syafii Maarif, faktanya bangsa ini tengah berada di ambang kehancuran yang sempurna atau memasuki kebangkrutan nasional.



Meskipun sudah seabad sejak pergerakan Boedi Oetomo menggaungkan kebangkitan nasional pada 1908, jumlah warga miskin masih tinggi, yakni 37,1 juta menurut data Badan Pusat Statistik. Bahkan jumlah warga miskin dipastikan bertambah seiring dengan rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Hasil analisis Tim Indonesia Bangkit menunjukkan akan ada tambahan orang miskin baru sekitar 4,5 juta jiwa pascakenaikan harga BBM. Akibatnya jumlah penduduk miskin menjadi sekitar 41,5 juta jiwa. Bahkan, ekonom CSIS Pande Radja Silalahi memperkirakan jumlah warga miskin bisa mencapai 45 juta hingga 50 juta orang.

Jumlah masyarakat miskin yang masih puluhan juta itu, kata Direktur Lembaga Penelitian, Pendidikan, dan Penerangan Ekonomi Sosial (LP3ES) Suhardi Suryadi, menunjukkan pengelolaan negara yang tidak berpihak kepada masyarakat miskin.

"Itu akan menambah jumlah masyarakat miskin, sekaligus membuat yang sudah miskin semakin bangkrut. Kalau puluhan juta masyarakat miskin jatuh bangkrut, itu merupakan awal kebangkrutan nasional," papar Suhardi, kemarin.

Belum lagi jumlah pengangguran terbuka yang hingga saat ini masih lebih dari 10 juta orang. Jika ditambah dengan pengangguran terselubung, angkanya bahkan mencapai lebih dari 30 juta orang.

Mereka itulah yang dalam beberapa tahun terakhir harus antre berjam-jam, bahkan ada yang berhari-hari, untuk mendapatkan minyak tanah, minyak goreng, dan beras murah. Daya beli mereka yang rendah menyebabkan mereka menderita kelaparan, bahkan rentan terhadap penyakit karena terpaksa mengonsumsi makanan yang nilai gizinya minim. Akibat-

nya, jutaan anak Indonesia menderita gizi kurang dan gizi buruk.

Tidak serius

Guru besar ekonomi pertanian Universitas Lampung, Bustanul Arifin, menilai pemerintah tidak serius melaksanakan cetak biru ketahanan pangan yang tertuang dalam Peta Jalan Ketahanan Pangan Nasional. Akibatnya, akses pemerataan kebutuhan pangan masyarakat belum tercapai.

Kalau kita ingin mencapai kebangkitan nasional kembali, lanjut Bustanul, ketahanan pangan harus menjadi prioritas. "Ketahanan pangan merupakan titik tolak peningkatan kualitas sumber daya manusia," kata Bustanul, Jumat (16/5).

Dalam soal sumber daya manusia ini, laporan UNDP terbaru terhadap indeks pembangunan manusia (HDI) Indonesia menunjukkan Indonesia hanya berada di urutan 108 dari 177 negara. Itu berarti sedikit lebih baik daripada Vietnam, negara yang baru berbenah, yang berada di posisi 111.

Tapi, peringkat HDI Indonesia masih tertinggal dari Malaysia yang menempati posisi 61, Thailand 74, dan Filipina 84. Kondisi itu diperparah makin mahalnya biaya pendidikan tinggi yang mempersempit akses warga miskin memperoleh pendidikan tinggi.

Masih suburnya praktik korupsi juga menambah berat masalah bangsa. Penasihat KPK Abdullah Hehamahua menyebutkan budaya korupsi saat ini mencapai stadium empat. "Ini sudah parah. Ibaratnya, kita sangat perlu keahlian untuk melobi malaikat pencabut nyawa."

Apabila tidak ada perbaikan signifikan untuk mengatasi hal itu, lanjutnya, Indonesia akan menghadapi kebangkrutan nasional.

Namun, harapan menuju perbaikan bukannya tidak ada. Budayawan Emha Ainun Nadjib menyatakan momentum 100 tahun Kebangkitan Nasional merupakan waktu yang tepat untuk memulai perubahan. "Bukan hanya harapan yang masih ada, melainkan juga kita punya kemampuan yang luar biasa untuk bangkit dan punya pengaruh di dunia internasional,"



■ MUM IRFAN
Abdullah H
Penasihat KPK